

## Dinkes DKI Siap Layani *Skrining* Warga Marunda Terdampak Pencemaran

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyatakan puskesmas di wilayah Kecamatan Cilincing siap melayani skrining kesehatan warga Marunda yang terdampak pencemaran batu bara. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Dinkes DKI untuk melakukan pemeriksaan kesehatan warga di Rusun Marunda, Jakarta Utara, secara berkala. "Marunda kan ada di wilayah Kecamatan Cilincing, jadi Puskesmas siap untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk skrining kesehatan kepada masyarakat itu ada sesuai tahap perkembangan umur," kata Kadinkes DKI Jakarta, Widyastuti, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/3).

"Mulai dari skrining usia balita, tumbuh kembang anak termasuk skrining kesehatan, tentang sesuai tumbuh kembang ya penglihatan, kemampuan motorik, kemudian usia lebih besar di sekolah juga sudah dilakukan skrining pada anak sekolah," imbuhnya.

Sehingga, sudah ada proses yang menangkap risiko kesehatan pada setiap perkembangan umur. Pihaknya juga mengutarakan kesiapannya jika ada kebutuhan untuk pemeriksaan kesehatan yang lebih spesifik.

Sebelumnya, banyak warga yang kurang mengetahui dampak negatif dari abu batu bara terhadap kesehatan

mereka. Diketahui, wilayah Rusun Marunda terdampak pencemaran abu batu bara. "Perlu kehadiran Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, yang menurut warga belum pernah hadir memeriksa kesehatan mereka hingga saat ini," ujar Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam keterangan pers, Minggu (20/3). Selain itu, warga juga kerap mengalami gangguan pernapasan, seperti batuk, pilek dan radang tenggorokan.

Retno juga menerima video dari warga yang menunjukkan abu batu bara menempel di lantai rumah, barang, hingga perkakas masak di dapur. "Paling banyak keluhan yang disampaikan adalah iritasi pada mata akibat partikel halus batu bara masuk ke mata dan menimbulkan gatal. Itu bahaya jika dikucek matanya," imbuh Retno.

Sebagai informasi, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) atas pencemaran lingkungan akibat abu batu bara di Marunda. Pihak KCN bertemu dengan Dinas LH DKI di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Kamis (17/3) lalu terkait sanksi yang dijatuhkan.

Sanksi tersebut menyangkut aktivitas perusahaan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU

Peserta penyandang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan pemilu 2024 secara maksimal.

# Pemprov Siapkan Strategi untuk Cegah Penurunan Muka Tanah di Jakarta

Menurut Afan Adriansyah, ada kriteria yang diterapkan terhadap pihak yang dilarang mengambil air tanah. Misalnya air tanah tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan bangunan dengan luas lebih dari 5.000 meter persegi dan jumlah lantai lebih dari delapan. Dalam mitigasi penurunan muka tanah, aturan tersebut juga harus dibarengi dengan cakupan air bersih hingga 100 persen.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah penurunan muka tanah di Ibu Kota. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, upaya tersebut dimulai dengan menyiapkan regulasi untuk mengontrol ekstraksi

air tanah. Regulasi tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah. "Jadi dalam Pergub tersebut ditetapkan bahwa tahun depan, mulai 1 Agustus 2023 untuk jalan maupun kawasan yang memang sudah dilayani air perpipaan,

sudah tidak diperkenankan lagi atau dilarang mengambil atau memanfaatkan air tanah," kata Afan, dalam acara peringatan Hari Air Sedunia, di Danau Cincin, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (22/3).

Menurut Afan, ada kriteria yang diterapkan terhadap pihak yang dilarang mengambil air tanah. Misalnya air tanah tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan bangunan dengan luas lebih dari 5.000 meter persegi dan jumlah lantai lebih dari delapan.

Afan mengatakan, dalam mitigasi penurunan muka tanah, aturan tersebut juga harus dibarengi dengan cakupan air bersih hingga 100 persen. "Posisi existing (cakupan air bersih) sekarang ini 68 persen. Kami bergerak menuju ke 100 persen pada tahun 2030," kata dia.

Agar cakupan air bersih

bisa mencapai 100 persen untuk seluruh DKI, kata Afan, pemprov melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membangun PAM domestik atau lokal, contohnya seperti SPAM Hutan Kota dengan kapasitas 500 liter per detik yang sudah beroperasi.

"Setelah SPAM Hutan Kota itu operasi, warga bisa terlayani air bersih dengan harga sangat murah, jauh berbeda dengan sebelum terbangunnya SPAM Hutan Kota tersebut," ujar dia.

Kemudian, pembangunan SPAM Regional yang dilakukan bersama pemerintah pusat seperti di Waduk Jatiluhur, Karian, dan lainnya. Termasuk juga memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.

"Ini semua kami upayakan

untuk mencapai target 100 persen pada 2030," kata Afan.

Lebih lanjut Afan mengatakan, kawasan Muara Baru, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara menjadi lokasi dengan penurunan muka tanah yang paling parah.

"Di Jakarta titik yang paling tinggi penurunan muka tanahnya, di pesisir yang posisinya ada di sekitar sisi barat dan yang terparah ada di sekitar Muara Baru," kata dia.

Afan mengatakan, penurunan muka tanah tersebut terjadi karena masifnya eksploitasi terhadap air tanah. Karena pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan, kata dia, maka tak mengherankan jika tanah di wilayah tersebut mengalami penurunan hingga 7,5 sentimeter setiap tahun. ● yan



FOTO: ANT

## AKSI HARI AIR SEDUNIA DI BALAI KOTA

Seorang pengunjung rasa dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan aksi hari air di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/3). Pada aksi tersebut mereka menolak privatisasi air dan menjamin pemulihan hak bagi masyarakat yang terdampak layanan air bersih di DKI Jakarta.

## Ketua DPRD DKI Janji Buat Terang Kasus Dugaan Korupsi Formula E

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjanji akan membuat terang kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta pada pemeriksaan kedua di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga berjanji akan patuh dan siap memberikan keterangan apapun kepada KPK soal dugaan penyalahgunaan anggaran terkait Formula E.

"Semoga keterangan yang saya dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan Formula E di Jakarta," kata Prasetyo melalui akun Instagram pribadinya @prasetyoedimarsudi di Jakarta, Selasa (22/3).

Politikus PDI Perjuangan itu kembali mendatangi KPK di Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan terkait permasalahan Formula E. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua setelah sebelumnya diperiksa pada Selasa (8/2).

Saat itu, ia membawa beberapa dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD hingga APBD 2019 yang diharapkan membantu KPK selama proses penyelidikan.

"Satu bundel dokumen sudah saya siapkan mulai dari KUA PPAS, RAPBD sampai APBD. Semua saya serahkan kepada penyidik KPK. Saya harap dokumen itu membantu KPK selama proses penyelidikan," katanya, Selasa (8/2).

Selain itu, Prasetyo juga akan menjelaskan mengenai proses penganggaran pe-

nyelenggaraan Formula E tersebut. "Mulai dari usulan, pembahasan sampai penge-sahan anggaran. Kemudian bagaimana pembayaran commitment fee sebesar Rp560 miliar yang dilakukan sebelum perda APBD disahkan," ujar Prasetyo.

### Hal biasa

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai agenda pemeriksaan KPK terhadap ketua DPRD DKI soal dugaan korupsi Formula E Jakarta merupakan hal biasa. "Kalau Ketua DPRD dipanggil KPK ini kan sebagai institusi DPRD itu biasa, ingin diskusi," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/3).

Menurut dia, KPK perlu masukan soal proses penganggaran hingga anggaran tersebut diputuskan. "Jadi saya kira tidak ada yang luar biasa kalau Ketua DPRD dipanggil ke KPK, Mabes Polri, Kejaksaan, itu kan salah satunya pihak aparat ingin mengetahui pola, mekanisme, SOP, aturan, ketentuan, tahapan, proses penganggaran program kerja. saya kira biasa saja," ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyebut tidak masalah apabila pejabat publik diperiksa berkali-kali karena aparat berwenang membutuhkan pendalaman terhadap suatu perkara. "Jangankan dua kali, mau berkali-kali juga 'kan tidak ada yang salah, namanya juga perlu diskusi, perlu pendalaman, perlu masukan, saya kira tidak ada masalah," ucapnya. ● yan

## ADA PERBAIKAN JALAN

# Waspada Macet di Tol Jakarta-Cikampek Arah Jakarta

BEKASI (IM) - Jasa Marga melakukan perbaikan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta sepanjang pekan ini. Para pengguna jalan diminta waspada potensi kemacetan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan jalan tersebut.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud, sekaligus mengimbau pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan," kata General Manager Representative Office 1 Jasmarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD), Muhammad Taufik Akbar di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/3).

Taufik menjelaskan pekerjaan rekonstruksi rigid pavement kali ini berada di Kilometer (KM) 26+367 hingga KM 26+267 bahu luar jalur arah Jakarta sepanjang 100 me-

ter mulai tadi malam dengan estimasi selesai pada Minggu (27/3) pukul 01.00 WIB.

"Tidak ada penutupan akibat pekerjaan ini. Ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan arah Cikampek masih beroperasi secara normal," katanya.

Jasa Marga telah menyiapkan mitigasi risiko di antaranya pengalihan arus lalu lintas terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, persiapan lawan arah apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

Taufik mengatakan pekerjaan perbaikan jalan ini dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan sekaligus upaya Jasa Marga meningkatkan standar pelayanan minimal.

Pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan mengantisipasi perjalanan dengan

memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, serta mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

"Selalu patuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan sesuai aturan Pemerintah serta berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan," katanya.

Para pengguna jalan Tol Jakarta-Cikampek saat ini dihadapkan tantangan berupa kemacetan dan kondisi jalan berlubang.

Kemacetan di jalan tol ini biasanya terjadi pada akhir pekan mulai dari wilayah Karawang hingga Bekasi.

Namun kemacetan pada tol Jakarta-Cikampek tetap tak terhindarkan di waktu-waktu tertentu seperti saat long weekend dan musim mudik lebaran. ● yan

# Disperkimtan Pemerintah Kabupaten Bekasi Siap Laksanakan Program Rutilahu 2022

CIKARANG PUSAT

(IM) - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengatakan kesiapannya untuk segera melaksanakan program Rutilahu TA 2022 di wilayahnya. Demikian Cecep Suparto, Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/3).

"Sudah, kita sudah siap. Ini data dari desa-desa sedang dipersiapkan. Insya Allah, bulan besok sudah bisa dilaksanakan. Doakan kita, ya, agar nanti tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Insya Allah, kita akan segera laksanakan Program Rutilahu Tahun Anggaran 2022. Itu saja, ya," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/3).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dedy Supriyadi memberikan pengarahan ke-



FOTO: MADONG LUBIS, INTERNATIONAL MEDIA, SELASA (22/3).

Cecep Suparto, Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

pada para pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi agar secepatnya melakukan perbaikan maupun

rehabilitasi, sebanyak 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal ini disampaikannya, pada saat menghadiri kegiatan

Bimbingan Teknis Disperkimtan, tentang Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 dan Sistem Kebijakan Penilaian Angka Kredit Bagi Fungsional di Hotel Grand Zuri, Cikarang Selatan, pada Selasa (15/3).

Sekda menyampaikan, perbaikan Rutilahu tersebut harus segera dilakukan mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan. Meskipun perbaikan Rutilahu dilakukan secara bertahap, hal tersebut akan sangat membantu penerima manfaat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.

"Dalam waktu dekat sudah masuk bulan suci Ramadhan, akan sangat bagus jika sebanyak 2.500 unit Rutilahu ini bisa diperbaiki secara bertahap, setidaknya bagi si penerima akan sangat terbantu dapat rumah layak untuk keluarganya," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdak Bekasi, Rabu (16/3).

Hal ini disampaikannya, pada saat menghadiri kegiatan

memberikan tindakan yang tegas terhadap yang bersangkutan," tutur Syafrin.

Namun, dalam menentukan sanksi akan diberikan, Syafrin akan menunggu hasil pemeriksaan lebih dahulu. "Itu sedang dilakukan pemeriksaan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah wisatawan di Kepulauan Seribu yang membawa kendaraan roda empat dikenakan tarif parkir menginap sebesar Rp 100.000. Pelabuhan Kali Adem merupakan salah satu lokasi pemberangkatan dan kedatangan wisatawan dengan tujuan Kepulauan Seribu.

Seorang wisatawan asal Jakarta Timur, Rosyid (41) mengaku terkejut saat hendak meninggalkan lokasi parkir mobilnya karena diminta Rp 100.000 untuk biaya parkir. "Saya diminta Rp 100.000 untuk parkir, harga itu katanya karena kendaraan menginap. Menurut saya sangat mahal, terlebih tidak ada tiket yang dikeluarkan petugas sebagai bukti retribusi," keluh Rosyid, dikutip dari Antara, Minggu (19/3). ● yan

Lebih lanjut, ia menjelaskan percepatan perbaikan Rutilahu tersebut juga sebagai momentum pembuktian kepada masyarakat maupun kepada Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki sebagai bentuk Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Disperkimtan.

"Termasuk Rutilahu, karena Pak Plt. Bupati ingin adanya percepatan. Ini juga bisa jadi pembuktian kepada masyarakat atas kinerja pemerintah. Jadi tolong segera dilakukan perbaikan dan dilakukan persemiannya," jelasnya.

Selain itu, Sekda juga akan memantau dan memastikan peningkatan kinerja Disperkimtan mengenai daerah permukiman yang membutuhkan penerangan jalan, pembebasan lahan, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIR-UP), serta pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Ia berharap, melalui kegiatan Bimtek ini para pegawai dapat semakin meningkatkan peran dari setiap tupoksinya pada masing-masing bidang. ● mdl

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. SANGRA RATU SEMESTA**

Direksi Perseroan dengan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 08 April 2022  
Waktu : Kantor PT. Sangra Ratu Semesta, Jl. Hayam Wuruk No.64-65, RT9/RW.4, Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat  
Tempat : 09.00 WIB - Selesai

Agenda RUPS/LB :- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyesuaian Maksud dan Tujuan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Bidang Usaha (KBLU) 2020

Keterangan :-  
- Panggilan melalui surat kabar ini dipronatkan bagi Pemegang saham yang namanya tercatat dalam anggaran dasar Perseroan, oleh karenanya berlaku juga sebagai surat panggilan resmi dari Perseroan.  
- Bahan-bahan rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat PT. Sangra Ratu Semesta sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat.  
- Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan, Rups/lti bisa diikuti juga dengan media telekonferensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Maret 2022  
DIREKSI PT. SANGRA RATU SEMESTA